

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu

Celsa Wantika Putri¹, Mahmud², Fahrul Mauzu³

^{1,2,3} Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Sep 19, 2026

Revised Sep 30, 2026

Accepted Oct 17, 2026

Keywords:

Management
Contraception
Family Planning
Population Control Service
Logistics Management

ABSTRACT

This research aims to analyze the management information system for contraceptive devices and drugs at the Population Control and Family Planning Service of Dompu Regency. The study focuses on the logistical management functions, encompassing the planning, procurement, distribution, storage, and monitoring processes to ensure optimal availability for the community. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing observation, structured interviews, and documentation for data collection. The results indicate that the management of contraceptive devices and drugs has been implemented effectively and in accordance with standard operating procedures. Needs planning is appropriately data-driven, and storage practices comply with national health logistics standards. However, several challenges remain, including upstream distribution delays, periodic stock limitations, geographical barriers affecting delivery, and a recording system that is not yet fully digitally integrated. Consequently, accelerating digital transformation for real-time reporting and improving logistical coordination are highly recommended to enhance the overall effectiveness of family planning services.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Celsa Wantika Putri,
Manajemen,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: elsacel@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dipandang paling efektif untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mencanangkan program KB guna membina akseptor sekaligus mencapai fungsi yang telah ditetapkan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Alat dan obat kontrasepsi (alokon) merupakan instrumen vital dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Pengelolaan alokon yang terencana dan efektif menjadi faktor penentu keberhasilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat terjangkau dan pelaksanaan program KB berjalan secara optimal (Panjaitan et al., 2019).

Manajemen secara umum didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengawasi sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan (Lestari & Haksama, 2017). Dalam konteks Keluarga Berencana, manajemen pengelolaan diartikan sebagai upaya mengatur kelahiran, jarak kehamilan, serta jumlah anak dalam keluarga. Upaya pengaturan ini direalisasikan melalui strategi promosi, perlindungan, dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat.

Proses pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan berlandaskan fungsi-fungsi manajemen logistik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan/pemusnahan, serta pencatatan dan pelaporan (Lestari & Haksama, 2017). Dalam alur operasional tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu memegang tugas dan fungsi strategis di tingkat daerah. Dinas ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan alokon, mengawal proses distribusi, hingga menangani tahap pemusnahan alat dan obat kontrasepsi secara akuntabel.

Penelitian ini dibangun berdasarkan sejumlah kajian terdahulu yang berfokus pada manajemen operasional dan digitalisasi pengelolaan alat serta obat kontrasepsi (alokon). Pada aspek tata kelola dan manajemen logistik fisik, beberapa peneliti menyoroti pentingnya perencanaan, pengadaan, dan kelancaran distribusi alokon yang efektif dalam mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana di berbagai daerah (Asnawi, 2013; Mahalia, 2017; Roshandi, 2019). Selain itu, evaluasi mengenai pengendalian internal persediaan alokon juga terbukti krusial untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya kekosongan atau penumpukan stok di gudang instansi pemerintah (Vijayanti et al., 2020).

Lebih lanjut, dalam aspek transformasi digital, pemanfaatan sistem informasi telah banyak diteliti untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan logistik. Penerapan aplikasi pengelolaan data persediaan alokon mampu meminimalisir kesalahan pencatatan secara manual (Manullang, 2016). Pengembangan sistem inventaris, pelaporan, dan *monitoring* berbasis *web* juga terbukti mempercepat akses informasi ketersediaan logistik di berbagai fasilitas kesehatan (Ratnasari & Herawati, 2017; Mukhtar & Devitra, 2022; Yuandi & Sagala, 2023). Bahkan, agar sistem ini berjalan dengan optimal, pelatihan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi pendistribusian alokon menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh dinas terkait (Khairunnisa et al., 2025).

Berdasarkan sintesis dari berbagai hasil penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar studi masih berfokus secara parsial, baik pada aspek evaluasi manualnya saja maupun pada perancangan aplikasinya saja. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) mengenai analisis sistem manajemen pengelolaan alokon secara komprehensif yang memadukan tantangan manajerial di lapangan dengan kendala integrasi pencatatan pelaporan di tingkat daerah kabupaten. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu. Dengan memahami faktor-faktor penentu operasional di lokasi tersebut, pihak dinas diharapkan mampu mengelola alat dan obat kontrasepsi secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori, dan identifikasi kesenjangan riset di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: "Bagaimana sistem manajemen pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu?".

2. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan, yang berakar dari kata "kelola", didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai upaya memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan suatu hal agar menjadi lebih baik serta bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Proses ini mencakup perumusan kebijakan, penentuan tujuan, dan pengawasan dalam pencapaian sasaran organisasi (Panjaitan et al., 2019). Terry (2013) mempertegas hal ini dengan mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha mencapai tujuan melalui kolaborasi dengan orang lain yang diwujudkan lewat empat langkah fungsional: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam praktiknya, pengelolaan operasional yang efektif sangat membutuhkan dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM merupakan infrastruktur digital yang mengombinasikan teknologi, dokumen, manusia, dan prosedur untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Kehadiran SIM sangat esensial untuk memastikan kelancaran proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (Lestari & Haksama, 2017).

Salah satu bentuk implementasi pengelolaan berskala nasional yang krusial adalah program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Keluarga Berencana diartikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak serta usia ideal melahirkan, dan

mengatur kehamilan (BKKBN, 2015). Program pemerintah ini dirancang secara khusus untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin tinggi. Sejalan dengan visi dan misi BKKBN untuk menjamin keberlangsungan pelayanan KB, program ini bertujuan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan menanamkan konsep NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) kepada masyarakat luas (Mukhtar & Devitra, 2022; Manullang, 2016). Melalui kampanye yang masif serta edukasi dasar di bangku sekolah, pemerintah secara berkesinambungan berupaya menekan angka kelahiran agar struktur kependudukan menjadi lebih stabil.

Untuk merealisasikan tujuan dari program Keluarga Berencana tersebut, pengelolaan dan penyediaan alat serta obat kontrasepsi menjadi instrumen yang sangat vital. Alat dan obat kontrasepsi digunakan oleh laki-laki maupun perempuan untuk mencegah, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan (Kohar et al., 2018). Manfaat dari penggunaannya sangat komprehensif, mulai dari mengatur kehamilan yang direncanakan, meningkatkan taraf kesehatan ibu dan bayi, mendorong kesejahteraan finansial keluarga, hingga memberikan peluang pendidikan yang lebih terjamin bagi anak. Terdapat berbagai metode kontrasepsi yang tersedia di masyarakat, di antaranya meliputi pil KB, implan (KB susuk), KB suntik, kondom, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau spiral, serta tindakan kontrasepsi permanen berupa vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Kelancaran pasokan dan distribusi dari berbagai jenis kontrasepsi inilah yang pada akhirnya sangat bergantung pada sistem informasi dan manajemen pengelolaan yang solid.

Indikator Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Indikator Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi berfungsi secara komprehensif untuk memantau ketersediaan, penggunaan, efektivitas, serta alur distribusi produk di lapangan. Siklus operasional pengelolaan ini diawali dengan tahap perencanaan, yang meliputi analisis kebutuhan dan peramalan permintaan untuk menentukan kuantitas serta jenis kontrasepsi yang tepat dengan berlandaskan pada teori perencanaan rantai pasokan. Setelah perencanaan rampung, langkah selanjutnya adalah pengadaan dari produsen atau pemasok dengan menerapkan strategi pengadaan logistik yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Produk yang telah diadakan kemudian dikelola dalam tahap penyimpanan yang ketat melalui penerapan manajemen inventaris dan standar penyimpanan farmasi (termasuk metode *just-in-time*) untuk menjamin mutu serta keamanannya. Rantai pasokan ini kemudian dilanjutkan dengan tahap distribusi, memanfaatkan jaringan logistik yang terstruktur hingga pengiriman tingkat akhir (*last-mile delivery*) guna memastikan alat dan obat kontrasepsi tersalurkan dengan merata ke berbagai fasilitas kesehatan pengguna.

Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan seluruh rantai pasokan tersebut, SIM juga bertumpu pada indikator pengawasan, yaitu pemantauan dan evaluasi. Kedua proses ini berjalan berkesinambungan untuk menilai sejauh mana efektivitas program pengelolaan serta kebijakan kontrasepsi yang sedang berjalan. Dalam proses evaluasi tersebut, sistem juga menuntut adanya identifikasi yang jelas terhadap faktor pendukung dan tantangan. Pemetaan terhadap berbagai kondisi riil di lapangan baik faktor yang mampu membantu dan mempercepat target, maupun kendala yang berpotensi menghambat jalannya distribusi menjadi sangat krusial. Dengan mengintegrasikan evaluasi pengawasan dan analisis faktor-faktor tersebut, manajemen dapat merumuskan strategi perbaikan yang adaptif guna memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu terjaga dengan optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dan menyajikannya dalam bentuk narasi yang komprehensif. Menurut Sugiyono (2017: 8), pendekatan deskriptif merupakan suatu metode yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data empiris melalui proses penyajian, analisis, dan interpretasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Moleong (2017) menjelaskan bahwa riset kualitatif berakar pada latar alamiah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengkajian sistem informasi manajemen terkait pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu. Penggunaan

metode ini memungkinkan peneliti untuk memotret realitas operasional secara objektif, mendetail, dan berbasis pada kondisi aktual di lapangan.

Dalam upaya menghimpun informasi yang akurat, prosedur pengumpulan data bertumpu pada tiga instrumen utama: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Fauji (2021) serta Sari et al. (2025), meskipun teknik pengumpulan data sosial kini semakin bervariasi dengan metode kontemporer, observasi dan wawancara tetap menjadi arus utama (*mainstream*) yang sangat menentukan kualitas data primer. Observasi langsung dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengamati secara tajam praktik manajemen pengelolaan kontrasepsi yang berjalan. Selanjutnya, pengumpulan data diperdalam melalui teknik wawancara terstruktur dengan petugas dinas terkait. Pendekatan terstruktur ini dipilih agar instrumen pertanyaan lebih terkonsep, menjaga fokus bahasan, serta mencegah terpecahnya konsentrasi peneliti maupun responden selama proses penggalian informasi. Sebagai penguat sekaligus instrumen triangulasi, studi dokumentasi diterapkan untuk menelaah arsip, laporan stok, dan dokumen kelembagaan yang merepresentasikan eksistensi serta kinerja operasional DPPKB Kabupaten Dompu.

Setelah data dari ketiga sumber tersebut terkumpul, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian dan pengolahan informasi menggunakan teknik analisis tematik yang dipadukan dengan model analisis data interaktif (Miles et al., 2014). Analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) secara khusus diaplikasikan untuk mengidentifikasi pola atau tema sentral yang muncul, seperti efektivitas sistem dalam pengambilan keputusan, tantangan implementasi, kepuasan pengguna, hingga perumusan rekomendasi perbaikan. Secara operasional, tahapan analisis ini merujuk pada langkah sistematis yang diadaptasi oleh Sugiyono (2017), yang mencakup tiga alur kegiatan bersamaan. Pertama adalah reduksi data, yakni proses menyeleksi, memfokuskan, dan merangkum hal-hal pokok agar data memberikan gambaran yang lebih tajam. Kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang bermuara pada penyajian temuan akhir dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, maupun *flowchart* yang menjawab rumusan masalah secara valid dan utuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu. Pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara terstruktur terhadap tiga informan utama yang memiliki keterlibatan dan otoritas langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Profil informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Kode	Alasan Pemilihan
Kepala Bidang Keluarga Berencana	I-1	Bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pengelolaan program KB di Kabupaten Dompu.
Pengelola Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi	I-2	Bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyimpanan, pencatatan, dan distribusi alat serta obat kontrasepsi.
Petugas Pengelola Program KB / Penyuluh KB	I-3	Bertanggung jawab dalam pendistribusian, pelaporan penggunaan alat kontrasepsi, serta <i>monitoring</i> di lapangan.

Sumber: Peneliti, 2026

Untuk menjawab tujuan penelitian, hasil analisis data diklasifikasikan berdasarkan enam indikator utama dalam pengelolaan logistik, yaitu:

Perencanaan

Proses perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dilakukan secara periodik dengan mengacu pada laporan penggunaan dari seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan KB di Kabupaten Dompu. Berdasarkan penuturan Informan I, perencanaan didasarkan pada jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), akseptor aktif, target pelayanan, serta laporan penggunaan bulanan. Informan II dan III menambahkan bahwa sisa stok di gudang, masa kedaluwarsa, hingga tren

permintaan masyarakat terhadap jenis kontrasepsi tertentu juga menjadi variabel penentu agar tidak terjadi penumpukan atau kekosongan persediaan. Secara keseluruhan, sistem perencanaan telah berjalan sistematis dan berbasis pada kebutuhan riil, meski terkadang masih terhambat oleh keterlambatan pelaporan dari beberapa fasilitas pelayanan.

Pengadaan

Mekanisme pengadaan alat dan obat kontrasepsi direalisasikan melalui BKKBN Provinsi berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh dinas di tingkat kabupaten. Informan I memaparkan bahwa usulan diajukan setiap periode dan barang akan dikirim ke gudang kabupaten setelah disetujui. Setibanya di gudang, Informan II memastikan bahwa setiap barang diperiksa kesesuaian jumlah, jenis, kondisi fisik, dan tanggal kedaluwarsanya sebelum diinput ke dalam sistem administrasi. Kendala utama pada tahap ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh ketiga informan, adalah seringnya terjadi keterlambatan pengiriman dari tingkat provinsi yang berimbas pada keterbatasan stok untuk beberapa jenis alat kontrasepsi.

Distribusi

Tahap distribusi dari gudang kabupaten menuju fasilitas pelayanan (Puskesmas dan fasilitas KB) dilakukan secara berkala maupun insidental jika terdapat permintaan tambahan (Informan I). Proses ini diwajibkan menyertakan kelengkapan dokumen administrasi yang valid untuk menjamin akuntabilitas (Informan II). Agar pelayanan tidak terputus, Informan III menegaskan bahwa koordinasi distribusi selalu dilakukan sebelum stok di fasilitas pelayanan benar-benar habis. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi berjalan cukup efektif, kendati tantangan geografis pada wilayah yang terpencil sesekali masih memicu keterlambatan pengiriman.

Penyimpanan

Manajemen penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di gudang telah mematuhi standar operasional logistik kesehatan dan pedoman dari BKKBN guna menjaga kualitas produk (Informan I dan III). Hal ini dibuktikan melalui penjelasan Informan II, di mana barang diklasifikasikan berdasarkan jenis, nomor *batch*, dan tanggal kedaluwarsa dengan menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO). Selain itu, kondisi gudang dijaga kebersihannya, dipastikan tetap kering dengan sirkulasi udara (ventilasi) yang baik, serta ditunjang dengan pemeriksaan fisik barang secara berkala.

Pemantauan dan Evaluasi

Fungsi pengawasan dilakukan secara terpusat melalui pelaporan stok dan penggunaan kontrasepsi dari fasilitas kesehatan. Evaluasi ini kemudian dibahas melalui rapat koordinasi dan analisis laporan (Informan I). Di tingkat gudang, pengecekan rutin setiap bulan dilakukan guna mencegah ketidakseimbangan persediaan (Informan II). Jika terdeteksi adanya defisit stok, petugas langsung berkoordinasi dengan dinas untuk percepatan distribusi (Informan III). Meski sebagian besar proses telah difasilitasi oleh aplikasi pelaporan BKKBN, sistem pencatatan manual masih kerap dipraktikkan, sehingga pembaruan data secara *real-time* belum sepenuhnya terwujud.

Faktor Pendukung dan Tantangan

Keberhasilan sistem ini sangat ditopang oleh dukungan BKKBN melalui penyediaan kelancaran alokasi alat kontrasepsi, penyusunan pedoman pengelolaan logistik yang jelas, fasilitasi pelatihan petugas, hingga terjalannya koordinasi antarunit pelayanan. Di sisi lain, tantangan operasional masih menjadi pekerjaan rumah; di antaranya adalah keterlambatan distribusi hulu, fluktuasi ketersediaan stok, hambatan infrastruktur geografis, serta sistem pelaporan yang belum terdigitalisasi secara paripurna.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan, implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu secara keseluruhan telah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajerial yang komprehensif. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, di mana operasionalisasi SIM di dinas tersebut telah mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, distribusi,

penyimpanan, serta pengawasan. Praktik ini sejalan dengan teori manajemen fungsional dari George R. Terry (2013), yang menegaskan bahwa manajemen yang efektif bertumpu pada kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi ini juga membuktikan pandangan Lestari & Haksama (2017) bahwa kehadiran SIM sangat krusial untuk memastikan proses bisnis dan kelancaran arus informasi.

Berikut adalah elaborasi mendalam untuk masing-masing indikator pengelolaan:

Perencanaan Kebutuhan Berbasis Data

Pada aspek perencanaan, sistem telah menggunakan pendekatan berbasis data (*data-driven*) yang merujuk pada laporan penggunaan riil di masa lalu, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), angka akseptor aktif, serta kalkulasi sisa persediaan. Pendekatan ini menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam meminimalkan risiko kekosongan stok (*stockout*). Langkah ini merepresentasikan fungsi perencanaan manajerial dari Terry (2013), di mana perumusan sasaran yang cermat di awal sangat menentukan keberhasilan rantai pasokan ke depannya.

Mekanisme Pengadaan dan Dinamika Rantai Pasok

Aspek pengadaan logistik telah patuh pada prosedur operasional standar BKKBN melalui usulan kebutuhan yang diajukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah. Meskipun sistem pengadaannya sudah terstruktur, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan pada rantai pasok (*supply chain*), yakni kerap terjadinya keterlambatan pengiriman dari tingkat provinsi. Keterlambatan ini menjadi hambatan utama yang secara langsung memengaruhi fluktuasi ketersediaan beberapa jenis alat kontrasepsi unggulan di gudang kabupaten.

Optimalisasi Distribusi di Tengah Tantangan Geografis

Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang DPPKB menuju berbagai fasilitas pelayanan kesehatan pada dasarnya telah berjalan sesuai jadwal dan tingkat kebutuhan faskes. Akan tetapi, kondisi topografis dan geografis Kabupaten Dompu menjadi tantangan tersendiri yang menyebabkan proses distribusi ke beberapa wilayah pinggiran membutuhkan waktu lebih lama. Untuk menjembatani kendala ini, fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan (*organizing* dan *actuating*) dioptimalkan lewat koordinasi dan komunikasi preventif antara pengelola gudang dengan fasilitas pelayanan agar kontinuitas pelayanan KB masyarakat tetap terjaga.

Standarisasi Penyimpanan Logistik Kesehatan

Dalam hal penyimpanan, tata kelola gudang DPPKB terbukti telah memenuhi standar manajemen logistik kesehatan nasional. Penerapan prinsip *First In First Out* (FIFO), kedisiplinan pencatatan stok, serta inspeksi berkala terhadap kondisi fisik dan batas kedaluwarsa barang berdampak signifikan pada terpeliharanya kualitas produk. Hal ini selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya (Panjaitan & Goenawi, 2019) yang mensyaratkan penjagaan fisik agar aset organisasi selalu berada dalam kondisi prima dan aman digunakan oleh masyarakat.

Pemantauan, Evaluasi, dan Urgensi Transformasi Digital

Fungsi pengawasan (*controlling*) telah diwujudkan melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi laporan penggunaan secara berkala. Kendati demikian, pencatatan yang masih mengombinasikan metode manual dan digital (hibrida) menjadikan alur pelaporan belum sepenuhnya efisien. Temuan ini sangat relevan dan memperkuat hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manullang (2016) serta Mukhtar & Devitra (2022). Kedua penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa pengolahan data persediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang tidak sepenuhnya terdigitalisasi berpotensi memunculkan kesalahan data dan kelambatan informasi. Oleh karena itu, migrasi dan pengembangan menuju sistem informasi terintegrasi yang berbasis *real-time* mutlak diperlukan guna mempercepat pengambilan keputusan manajerial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di DPPKB Kabupaten Dompu telah berjalan cukup efektif dalam menopang keberhasilan program Keluarga Berencana. Meskipun demikian, berkaca dari tantangan yang ada dan temuan riset terdahulu, pihak dinas perlu melakukan akselerasi digitalisasi

sistem pelaporan secara utuh, memperkuat jalur koordinasi logistik antarunit, serta memetakan strategi kelancaran distribusi untuk menekan dampak hambatan geografis dan keterlambatan pasokan dari tingkat provinsi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu telah terimplementasi dengan baik secara operasional. Sistem pengelolaan ini secara komprehensif telah mengadopsi fungsi-fungsi manajemen logistik yang mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, hingga pemantauan dan evaluasi. Proses perencanaan kebutuhan dinilai telah tepat sasaran karena dirumuskan menggunakan pendekatan berbasis data, yakni dengan mengacu pada laporan penggunaan riil, kalkulasi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), akumulasi akseptor aktif, serta dinamika sisa persediaan. Pendekatan ini terbukti mampu mendukung ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan di masyarakat.

Pada aspek pelaksanaan, mekanisme pengadaan dan alur distribusi telah sepenuhnya mematuhi prosedur standar yang ditetapkan oleh BKKBN. Tata kelola penyimpanan di gudang juga telah menerapkan standar operasional logistik kesehatan yang ketat, sehingga mutu, kualitas, dan keamanan instrumen kontrasepsi tetap terjaga secara optimal. Sebagai instrumen pengawasan, kegiatan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui rekapitulasi laporan stok dan pelacakan data penggunaan reguler dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah kerja.

Meskipun sistem secara umum telah berjalan efektif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala teknis dan manajerial yang masih memerlukan intervensi. Tantangan utama tersebut meliputi keterlambatan pasokan distribusi dari hulu, fluktuasi keterbatasan stok pada periode-periode tertentu, hambatan kondisi geografis yang memengaruhi ketepatan waktu penyaluran, serta sistem pencatatan pelaporan yang belum terintegrasi secara digital secara utuh. Sebagai implikasi perbaikan, dinas direkomendasikan untuk melakukan akselerasi dan pengembangan sistem informasi digital yang lebih mutakhir dan *real-time*. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi koordinasi antara DPPKB Kabupaten Dompu dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sangat krusial untuk diwujudkan agar pengelolaan logistik kontrasepsi di masa mendatang menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Asnawi, M. A. (2013). *Manajemen program keluarga berencana di Kota Gorontalo*. Tesis magister, Universitas Negeri Gorontalo
- BKKBN. (2015). Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Jakarta: BKKBN
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Fauji, D. A. S., & Puspasari, I. D. (2021). *Analisis data penelitian manajemen: Studi fokus analisis kualitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. <http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/4307>
- Khairunnisa, D., Irmawati, D., Rahmi, N., Sihombing, A., Suandi, M. D., & Khoirunnisa, D. (2025). Pelatihan penggunaan aplikasi pendistribusian alat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Komputer*, 2(1), 33–63. <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jpmik/article/view/1873/1257>
- Kohar, M., Mandagi, C. K. F., & Korompis, G. E. C. (2018). Gambaran pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018. *Jurnal KESMAS*, 7(5).
- Lestari, P. B., & Haksama, S. (2017). Analisis fungsi manajemen logistik di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.20473/jaki.v5i1.2017.1-10>
- Mahalia, L. D. (2017). Analisis penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pemerintah di Kota Palangkaraya tahun 2012. *Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah*, 7(2), 56–64.
- Manullang, H. (2016). *Aplikasi pengolahan data persediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) program KB pada gudang BKKBN Kota Samarinda* [Laporan Tugas Akhir, STMIK Widya Cipta Dharma]. Repository STMIK Widya Cipta Dharma. http://repository.wicida.ac.id/262/1/1331088_Diploma_ML.pdf
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mukhtar, M., & Devitra, J. (2022). Sistem informasi pengelolaan obat dan alat kontrasepsi berbasis web pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 7(4), 513–523. <https://doi.org/10.33998/jurnalmsi.2022.7.4.680>
- Panjaitan, R. M., Goenawi, L. R., & Lolo, W. A. (2014). Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/pharmacon/article/view/5423/4930>
- Ratnasari, D. P., & Herawati, S. (2017). Implementasi sistem informasi inventaris obat dan alat kontrasepsi berbasis web. *Jurnal Simantec*, 6(1), 33–38.
- Roshandi, F. N. (2019). *Perencanaan dan pengadaan alat dan obat kontrasepsi di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur* [Disertasi doktor, Universitas Airlangga].
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4). <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). *Dasar-dasar manajemen*. PT Bumi Aksara.
- Vijayanti, E., Yudi, & Mirdah, A. (2020). Analisis pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi (Studi kasus pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(2), 204–216. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>
- Yuandi, I. A., & Sagala, L. O. H. S. (2023). Sistem informasi monitoring alat kontrasepsi UPTD KB Kabupaten Kolaka Timur. *Prosiding Sempatin*, 1(1), 121–128. <https://epublikasi.digitalinnovation.com/index.php/sempatin/article/view/131>